



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM
AUDIENSI PANSUS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA
JUM'AT, 11 OKTOBER 2019**

Tahun Sidang	:	2019 – 2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Audiensi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Jum'at, 11 Oktober 2019
Waktu	:	Pukul 10:00 – 11:00 WIB
Tempat	:	Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Gedung Nusantara III Lt 3.
Acara	:	Audiensi Pansus Pemindahan Ibukota Negara
Pimpinan Pertemuan	:	Dr. HM. Azis Syamsuddin, SH., SE., MAF., MH (Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
Sekretaris	:	Insan Abdirrohman, SH, M.Si Plt. Kabag. Set.Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir	:	Kepala Bagian Pansus DPR RI; Tim IKN DPR RI; Berikut daftar nama terlampir;

A. Pendahuluan

Pada hari Jum'at, 11 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Audiensi Pansus Pemindahan Ibukota Negara yang bertempat di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Gedung Nusantara III lantai 3.

B. Pokok-Pokok Pembicaraan

1. Pansus Pemindahan Ibukota Negara menyampaikan Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
2. Pansus Pemindahan Ibukota Negara menyampaikan bahwa dari sumber BPS tahun 2017 dan United Nations Urban Data tahun 2013 memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 Jakarta menempati rangking ke 10 sebagai kota terpadat di dunia, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi kota nomor 9 terpadat di dunia.
3. Kepadatan Jakarta menyebabkan kerugian ekonomi akibat kemacetan yang meningkat dari 56 Trilyun per tahun di tahun 2013 menjadi 65 Trilyun per tahun di tahun 2017.
4. Pansus Pemindahan Ibukota Negara menyampaikan bahwa menurut hasil kajian pemindahan ibu kota, Indonesia membutuhkan rancangan ibu kota dengan urban design yang mampu mempresentasikan identitas dan persatuan bangsa dalam kerangka *nation and state building*, merefleksikan kebhinekaan Indonesia, ibu kota yang dapat mengakomodasi konsep '*smart, green, and beautiful city*'.

5. Pansus Pemindahan Ibukota Negara menyampaikan bahwa terdapat beberapa alternative dalam pemilihan lokasi ibu kota. Dimana alternative pertama adalah dengan menetapkan distrik pemerintahan tetap di Jakarta, alternative kedua adalah memindahkan ibukota ke wilayah dekat Jakarta, dan alternative terakhir dengan memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.
6. Pansus Pemindahan Ibukota Negara menjabrakan, bahwa dalam kajian pemindahan ibu kota negara, terdapat 3 daerah potensial yang dipilih pemerintah. Yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Terkait estimasi biaya pemindahan ibukota, untuk Skenario 1 dimana seluruh ASN dipindahkan tanpa dilakukan *right sizing* jumlah ASN, maka biaya yang dibutuhkan mencapai 466 Trilyun rupiah. Hal ini akan berbeda jika Pemerintah memutuskan untuk melakukan Skenario 2, dimana ASN dipindahkan sebagian melalui skema *right sizing* jumlah ASN sehingga biaya pemindahan ibu kota turun menjadi 323 Trilyun rupiah.
8. Terkait skema pembiayaan pemindahan ibukota, Pemerintah berencana untuk tidak mendominasi pembiayaan oleh APBN, namun dengan mengutamakan peranan swasta dan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
9. Pembiayaan yang bersumber dari APBN dilakukan secara *multi years* dan diusahakan untuk tidak mengganggu program prioritas nasional.
10. Skema pembiayaan lainnya adalah Pemerintah akan mengundang kerjasama dengan swasta untuk pemanfaatan dan optimalisasi asset.

C. Penutup

Pertemuan ditutup pukul 11:00 WIB.

a.n. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat



INSAN ABDIRROHMAN, SH, M.Si
NIP. 19800919 200502 1 005